

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin meningkat, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan yang baik. Masyarakat semakin sadar akan hak mereka dalam mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai bagaimana pemerintah mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang berkualitas menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pemerintah Kabupaten Bireuen, seperti halnya daerah lain di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan laporan keuangan yang disajikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai kendala dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas, baik dari segi keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, maupun kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. K0p/endala-kendala ini dapat disebabkan

oleh berbagai faktor, di antaranya kelemahan sistem pengendalian internal, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

Sistem pengendalian internal merupakan elemen penting dalam memastikan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal yang efektif dapat mencegah, mendeteksi, serta mengoreksi kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Pemerintah telah mengatur pentingnya sistem pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yang menekankan perlunya pengendalian internal untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Studi yang dilakukan oleh (Mardiasmo, 2009) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan (Siregar, 2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak selalu berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks Kabupaten Bireuen, di mana efektivitas sistem pengendalian internal masih menjadi perdebatan. Faktor seperti lemahnya implementasi sistem pengendalian internal, kurangnya dukungan pimpinan dalam penerapan pengawasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dapat menjadi penyebab utama mengapa pengendalian internal tidak selalu berjalan efektif.

Selain sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia juga merupakan faktor kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah mencakup pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan, keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan, serta pengalaman dalam mengelola transaksi keuangan dengan benar. (Firstanto *et. al*, 2023) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang memadai. mendukung temuan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil yang bertentangan dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti rendahnya motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya, kurangnya sistem insentif yang mendukung peningkatan kinerja, atau budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung profesionalisme dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks Kabupaten Bireuen, masih terdapat kendala terkait kompetensi SDM, di mana banyak pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan memiliki pemahaman yang terbatas mengenai administrasi keuangan daerah serta kurang mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan. Gap ini menunjukkan bahwa meskipun kompetensi sumber daya manusia secara teori dianggap sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, namun dalam praktiknya, pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada faktor pendukung lainnya.

Selain sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya teknologi informasi, proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat,

akurat, serta sistematis, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi kerja.

Teknologi informasi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mudah mengakses data keuangan secara real-time, mempercepat proses audit, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (Pramudiarta, 2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam proses akuntansi dan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh (Firdaus, 2015) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang bertentangan. pemanfaatan teknologi informasi tidak selalu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil yang berbeda ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan bagi pegawai dalam menggunakan sistem informasi keuangan, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya integrasi antara sistem informasi akuntansi yang diterapkan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam konteks Kabupaten Bireuen, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya integrasi sistem antarinstansi, kesiapan SDM dalam mengoperasikan sistem, serta keterbatasan anggaran untuk meningkatkan dukungan teknis dalam penerapan teknologi informasi. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam melihat bagaimana teknologi informasi benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya (research gap) terkait pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketiga faktor tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Bireuen. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas hubungan antara variabel-variabel yang diteliti serta mengisi celah penelitian yang masih menjadi perdebatan dalam literatur akademik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan teori terkait pengelolaan keuangan daerah tetapi juga memberikan implikasi praktis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan.

Fenomena dalam sistem pengendalian internal menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga berisiko menimbulkan penyimpangan dan ketidakefisienan. Kurangnya kepatuhan terhadap prosedur serta minimnya pengawasan yang ketat menyebabkan laporan keuangan sering kali tidak akurat dan tepat waktu.

Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah juga masih menjadi kendala, terutama dalam pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan dan penerapan prinsip akuntabilitas. Banyak pegawai yang belum

mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, di Kabupaten Bireuen, penggunaan teknologi dalam sistem keuangan masih belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pelatihan pegawai dalam mengoperasikan sistem akuntansi berbasis teknologi.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bireuen”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bireuen ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bireuen.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bireuen.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bireuen.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Manfaat Penelitian Secara Teoritis Dan Praktis Antara Lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan manfaat referensi bagi pengetahuan dan pengembangan ilmu yang terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
    - a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian seanjutnya dengan topik yang sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan laporan keuangan daerah sesuai dengan undang-undang tahun 2013 tentang keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).